

BAB IV

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan penulis terhadap pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan di masa pandemi COVID-19 pada KPKNL Surakarta dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Tujuan dari pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa yang dilakukan KPKNL Surakarta adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan tersebut berupa pemberian relaksasi pembayaran sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
2. Pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa meningkatkan jumlah persetujuan yang diterbitkan dan juga PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan sewa tersebut. Tahun 2020 saat pandemi COVID-19, jumlah persetujuan sewa yang diterbitkan KPKNL Surakarta sebanyak 31 persetujuan dan menghasilkan PNBP Rp748.140.690,00. Tahun 2021 jumlah persetujuan yang diterbitkan masih mengalami peningkatan sebanyak 45 persetujuan sewa dan menghasilkan PNBP Rp757.544.907,00. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan sebelum relaksasi pembayaran sewa dilakukan.

3. Dalam pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa KPKNL Surakarta memiliki beberapa permasalahan seperti tidak adanya sosialisasi yang diberikan membuat usulan permohonan nilai sewa yang diajukan satuan kerja sangat tinggi dan memberatkan para penyewa. Dalam proses permohonan sewa dokumen permohonan sewa yang diajukan satuan kerja tidak lengkap karena satuan kerja maupun penyewa tidak bisa membuat laporan keuangan. Kemudian tingginya nilai BMN yang disewakan kepada jenis usaha pendidikan membuat penyewa mengalami keberatan dalam melakukan pembayaran uang sewa.
4. Alternatif dari penyelesaian masalah tersebut yaitu pemberian sosialisasi pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa. Adanya sosialisasi diarpakan satuan kerja mengerti tentang pelaksanaan relaksasi pembayaran sewa yang saat ini diberikan pemerintah sehingga dalam mengajukan usulan nilai permohonan sewa sesuai dengan kemampuan membayar penyewa. Memberikan pendampingan atau membuatkan format laporan keuangan sesuan dengan peraturan yang berlaku. Tingginya nilai aset yang membuat tingginya nilai sewa dalam BMN yang disewakan untuk jenis usaha Pendidikan upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan faktor periodesitas sewa yang diberikan pemerintah.